

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu pembahasan yang menarik untuk dikaji dalam dunia Pendidikan yaitu berkaitan dengan “pembiayaan pendidikan” yang dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan. Bahkan dikatakan setiap upaya pencapaian tujuan Pendidikan tidak ada yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan.

Konsep pembiayaan Pendidikan secara global menunjukkan bahwa pembiayaan Pendidikan merupakan Persoalan Publik (*Public Discourse*) hampir disemua negara di dunia yang cukup rumit dan kompleks. Hal ini menjadi bukti bahwa pembiayaan Pendidikan merupakan hal yang sentimental dan esensial dalam pembangunan Pendidikan, sedangkan Pendidikan sendiri merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kualitas suatu negara.

Dalam survey yang dilakukan HCBC tahun 2018 menyatakan 15 negara dengan biaya Pendidikan termahal di dunia terlepas karena banyaknya penduduk maupun besaran nilai mata uang yang dikeluarkan. Berikut hasil survey nya dalam tabel di bawah ini :

Table 1.1 Data 15 negara biaya termahal di dunia

No	Negara	Biaya Pendidikan (dalam satuan us\$ juta)
1	2	3
1	Hongkong	132,161
2	Uni Emirates Arab	99,378
3	Singapura	70,939
4	Amerika	58,424

1	2	3
5	Taiwan	56,424
6	China	42,892
7	Australia	36,402
8	Malaysia	25,479
9	Inggris	24,862
10	Meksiko	22,602
11	Kanada	22,602
12	India	18,909
13	Indonesia	18,433
14	Mesir	16,863
15	Perancis	16,708

Sumber : www.cnbcindonesia.com

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam posisi ke 13 dengan biaya termahal di dunia. Hal ini sebagai bukti bahwa kesadaran negara terhadap Pendidikan cukuplah besar. Kebutuhan Pendidikan akan pembiayaan sangat kompleks sebagaimana beberapa teori mengenai pembiayaan Pendidikan yang ditemukan.

Muhaimin dan Majid menyebutkan bahwa pembiayaan Pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan masalah mencari dana, bagaimana menggunakan dana tersebut dengan menggunakan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja dan merencanakannya untuk masa mendatang. Sementara biaya Pendidikan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik berupa uang maupun non moneter. Biaya tersebut memerlukan pengelolaan yang jelas.¹

¹ Muhaimin & Abdul Majid. *Pemikiran Pendidikan Islam*. (Bandung: Tri Genda Karya, 2013),

Berbagai teori pembiayaan Pendidikan berkembang pesat sehingga menumbuhkan kesadaran dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Teori di atas menggambarkan bahwa pembiayaan Pendidikan bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan, maka perlu adanya manajemen yang baik dari berbagai pihak yang bersangkutan, baik dari pemerintah, sekolah, maupun masyarakat sekitar.

Sementara masalah perekonomian Indonesia saat ini masih belum ada tanda-tanda akan terbebas dari krisis yang berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat dicermati dari kebutuhan hidup yang semakin tidak terjangkau. Misal dalam persoalan Pendidikan, karena bila dicermati saat ini biaya Pendidikan semakin mahal. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, sekalipun Pemerintah telah memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP negeri, namun dianggap oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik.

Kesadaran akan pentingnya pembiayaan Pendidikan di Indonesia juga ditandai dengan keikutsertaan pemerintah, serta masyarakat dalam pengadaan biaya Pendidikan. Sebagaimana yang diketahui “Pendidikan Indonesia saat ini pada tingkat sekolah (satuan Pendidikan), pembiayaan Pendidikan diperoleh dari Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), juga dari iuran masyarakat atau orang tua.”² Sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau Yayasan.

Dalam kaitan ini, Thomas H mengatakan “*In the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals*”. Dengan kata lain,

² Dedy Achmad Kurniady, Linda Setiawati, dan Siti Nurlatifah, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan,” *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17:3 (Juli 2018), 263

biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu; 2) biaya masyarakat (social cost), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Lebih lanjut Thomas H mengatakan “*Sometimes called public cost, the include cost of educations financed through taxation. Most public school expenses are examples of sosial costs*”.³ Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat

Berikut sebagai bukti upaya keikutsertaan pemerintah dalam pembiayaan Pendidikan yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Provinsi Jawa Barat :⁴

Tabel 1.2 laporan penyaluran BOS

Pencairan									
Kab /Kota	Dikdas		Dikmen Negeri			Dikmen Swasta			Total
	SD	SMP	SMAN	SMKN	SLBN	SMAS	SMKS	SLBS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kab. Subang	39.364.770.000	21.132.648.000	8.791.752.000	5.900.832.000	322.368.000	2.756.784.000	12.399.408.000	686.688.000	91.355.250.000
Kab. Purwakarta	27.791.100.000	12.870.486.000	6.508.476.000	6.787.740.000	366.912.000	757.692.000	3.969.060.000	290.472.000	59.341.938.000
Kab. Karawang	62.893.740.000	29.033.937.000	11.754.312.000	9.168.390.000	262.314.000	1.586.424.000	20.764.350.000	241.074.000	135.704.541.000
Kab. Bekasi	91.233.492.000	41.896.449.000	20.602.548.000	9.228.858.000	131.892.000	5.124.231.000	26.770.020.000	715.173.000	195.702.663.000
Kab. Bandung Barat	44.132.832.000	21.162.492.000	8.515.404.000	3.883.650.000	164.052.000	5.032.827.000	12.255.810.000	1.234.296.000	96.381.363.000

³ Thomas. H. Jones. *Introduction to school finance: Technique and social Policy*. (New York: Macmilan Pusblishing Company, 1985), 17

⁴ Laporan penyaluran BOS, https://bos.kemdikbud.go.id/rekap/penyaluran_provinsi diakses pada 13 Agustus 2022 pukul 10:07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kab. Pangandaran	8.388.630.000	4.548.060.000	1.874.250.000	2.580.960.000	110.250.000	207.000.000	2.137.920.000	307.650.000	20.154.720.000
Kota Bandung	57.520.806.000	33.070.680.000	14.803.986.000	13.158.054.000	210.312.000	11.461.671.000	16.252.992.000	3.022.092.000	149.500.593.000
Kota Bogor	29.431.323.000	14.624.064.000	5.080.20.000	3.636.576.000	72.360.000	4.375.680.000	15.742.488.000	853.848.000	73.816.359.000
Kota Sukabumi	8.584.920.000	4.882.020.000	2.834.550.000	2.910.720.000	63.000.000	730.800.000	2.799.840.000	236.250.000	23.042.100.000
Kota Cirebon	8.411.850.000	5.708.010.000	4.512.150.000	1.835.520.000	177.450.000	824.850.000	3.482.400.000	278.250.000	25.230.480.000
Kota Bekasi	61.291.584.000	31.300.332.000	11.173.140.000	7.961.880.000	385.671.000	8.464.176.000	24.009.480.000	735.150.000	145.321.413.000
Kota Depok	45.031.500.000	24.732.084.000	7.512.828.000	2.433.573.000	136.188.000	6.042.732.000	17.561.763.000	768.240.000	104.218.908.000
Kota Cimahi	13.292.970.000	7.335.840.000	3.546.972.000	3.020.706.000	314.130.000	964.017.000	5.729.100.000	488.400.000	34.692.135.000

Sumber : bos.kemendikbud.go.id

Berdasarkan laporan penyaluran dana BOS di atas dapat disimpulkan bahwa besaran biaya Pendidikan setiap jenjang Pendidikan berbeda, begitupula besar anggaran untuk setiap daerah. Hal ini disebabkan dari perbedaan populasi dan jumlah siswa, serta perbedaan besaran UMR setiap kabupaten dan kota juga beragam.

Menurut Ferdi W.P faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: 1) kenaikan harga (*rising prices*); 2) perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*); 3) perubahan dalam populasi dan

kenaikannya prosentasi anak di sekolah negeri; 4) meningkatnya standar pendidikan (*educational standards*); 5) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan 6) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*).⁵

Pengelolaan pembiayaan sebetulnya sudah banyak dilakukan dengan baik di berbagai Lembaga Pendidikan negeri maupun swasta. Hanya substansi dan teknisnya saja beragam disesuaikan dengan kapasitas dan mobilitas Lembaga terkait. “Keragaman ini juga didasarkan pada besar kecilnya Lembaga, letak Lembaga serta tinggi atau rendahnya biaya Pendidikan tersebut.”⁶ Sekolah dengan pengadaan pembiayaan yang tergolong rendah dari masyarakat, akan cenderung memiliki sistem pengelolaan yang lebih sederhana ketimbang dengan sekolah yang daya dukung pengadaan pembiayaan tinggi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan sekolah dengan dukungan pengadaan pembiayaan lebih tinggi harus mampu menampung banyak tuntutan dan tanggungjawab dari masyarakat.

Meski sedemikian sederhana maupun rumitnya sebuah pengelolaan pembiayaan di suatu lembaga, tetap menjadi hal yang patut menjadi perhatian. Pengelolaan pembiayaan sendiri berarti bagaimana sebuah lembaga pendidikan dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pendidikan yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Tomas H. Jones menjelaskan bahwa “Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ketiga tahapan ini bila diterapkan dalam manajemen keuangan atau pembiayaan menjadi Tahap Penganggaran (*Budgeting*), Pelaksanaan (*Akunting*), dan Tahap Penilaian atau Penilaian (*Auditing*).”⁷

⁵ Ferdi W.P. *Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis*. (Balitbang: kemendikbud, 2013), 573

⁶ Imansari, Nazilatul. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Swasta (Studi Kasus di MTs. Sa Jabal Nuur Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)*. thesis, IAIN Kediri: 2020), 12

⁷ Thomas. H. Jones. *Introduction to school finance*, 14

Dalil naqli mengenai manajemen pembiayaan sendiri, terperensentatiskan melalui Al-Qur'an surat yusuf ayat 47-49, adalah sebagai berikut :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ
فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Dia (Yusuf) berkata, Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).

Makna ayat terkait dalam tafsir ibnu katsir yang dikutip Ahmad Noor Islahudin disebutkan bahwa, “manajemenlah makanan kalian di tahun-tahun subur ini dengan mengambil sedikit demi sedikit dan kalian dapat memanfaatkannya di tujuh tahun yang sulit.”⁸ Ayat di atas menyampaikan bahwa Nabi Yusuf AS memerintahkan mereka menanam selama tujuh tahun dengan tekun, kemudian memerintahkan untuk mengatur dan memanej pemanfaatan hasil tanaman tersebut untuk diambil sedikit dan membiarkan yang lainnya untuk tetap tumbuh. Begitupula manajemen pembiayaan Pendidikan, harus mengatur dan memanej setiap pengadaan sumber biaya dan memanfaatkannya dengan baik melalui penganggaran, *akunting*, dan pengawasan / *auditing*, sehingga bisa menghasilkan manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien.

Pembiayaan pendidikan sebagai komponen terpenting dalam pelaksanaan program pendidikan, menitikberatkan pada penggunaan anggaran yang efektif dan

⁸ Ahmad Noor dan Nina Ramdani. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Al-Qur'an”, *Mindset: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1:1. (Juni 2022), 3

efisien, hal ini sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan Pendidikan dengan mangacu pada kebutuhan pokok, dan skala prioritas program pembangunan Pendidikan. “Segala sumber pendapatan pembiayaan pendidikan perlu di hitung dan dikelola dengan baik demi keberlangsungan program pendidikan pada masing-masing lembaga/sekolah.”⁹

Boarding School sebagai lembaga yang memiliki fasilitas dan program modern membutuhkan biaya yang mencukupi untuk bisa bertahan dan mengembangkan lembaga ditengah arus globalisasi saat ini. “Sebagaimana yang diketahui *Boarding School* teradopsi dari sistem Pondok Pesantren, yakni sekolah berasrama yang dimana peserta didik, guru, dan pengelola sekolah tinggal dalam lingkungan sekolah dengan kurun waktu tertentu.”¹⁰

Keberadaan program *Boarding School* tentu harus dibarengi dengan manajemen yang baik. *Boarding School* memiliki kebutuhan yang sangat banyak, atas dasar ini lembaga dituntut memiliki seni dan kemandirian dalam mengelola sumber pembiayaannya. Selain itu, *Boarding School* sebagai unit pendidikan mandiri dimana kepemilikannya kolektif antara para pengurus dan para peserta didik, sehingga memiliki resistensi yang lebih tinggi dalam menghadapi masalah anggaran/pembiayaan pendidikan.

SMPIT As-Syifa *Boarding School* Jalancagak Subang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan terbaik yang ada di kota Subang. Berdasarkan hasil observasi awal pada bulan Mei lalu ditemukan fakta bahwa Lembaga terkait tidak bisa terlepas dari manajemen pembiayaan karena hal tersebut menunjang operasional sekolah serta sarana prasarana yang ada. Konsep Pendidikan di SMPIT As-Syifa Jalancagak cenderung lebih kompleks dan padat akan berbagai program dan kegiatan. Pihak

⁹ Mohamad Rojii dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, *Problematika pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah di indonesia*, 2019 <http://eprints.umsida.ac.id> (diunduh pada September 2022 pukul 06:44).

¹⁰ Andri Septilinda Susiyani, Subyantoro. Manajemen *Boarding School* dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam di Muhammadiyah *Boarding School* (MBS), *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 2:2, (November 2017), 3

Lembaga terkait mengaku bahwa dalam menjalankan hal tersebut, orang tua siswa tentu perlu berpartisipasi dalam menjunjung tujuan Lembaga khususnya dalam masalah pembiayaan. Terlebih Lembaga swasta, meski mendapat dana BOS namun tetap memerlukan dana bulanan (SPP) untuk menunjang operasional lainnya.

Manajemen Pembiayaan Operasional Pendidikan di SMPIT As-Syifa *Boarding School* Subang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diperoleh diantaranya hampir 100% anggaran kebutuhan sekolah selalu terpenuhi, pengelolaan pembiayaan juga tertata dengan baik, anggaran tidak melebihi plafond yang ditentukan Yayasan, kerjasama antara bagian keuangan yayasan dan bendahara sekolah terjalin dengan baik, dan sisa anggaran bisa dikembalikan ke Yayasan untuk keperluan pengembangan lembaga dsb. Dampak negatif yang diperoleh diantaranya sekolah memiliki biaya SPP dan daftar ulang tahunan yang cukup besar, memiliki anggaran pertahun yang bengkak, tidak jarang terjadi tunggakan pembayaran yang cukup besar setiap tahunnya, karena mengingat beberapa persen siswa notabennya dari segi ekonomi menengah kebawah, terlebih saat pandemi covid 19, namun bisa disiasati dengan sistem subsidi silang. Sementara itu, dengan menganut sistem sentralisasi pengelolaan pembiayaan oleh Yayasan yang menaunginya, akuntabilitas lembaga terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipertanyakan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan atau manajemen pembiayaan operasional Pendidikan yang dilakukan di SMPIT As-Syifa *Boarding School* jalancagak Subang dilakukan khususnya menganalisa bagaimana proses penganggaran (*Budgeting*) dilakukan, bagaimana pelaksanaan (*Accounting*) dilakukan, serta bagaimana proses penilaian (*Auditing*) dilakukan. Sehingga dalam penulisan tesis kali ini, penulis mengajukan judul penelitian, yaitu Manajemen Pembiayaan Operasional Pendidikan (Penelitian di SMPIT As-Syifa *Boarding School* jalancagak Subang).

¹¹ Hasil wawancara dengan Manajer Keuangan Yayasan, Andriansyah pada Juni 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil rumusan masalah penelitian secara umum yaitu : bagaimana manajemen pembiayaan operasional pendidikan di As-Syifa *Boarding School* Subang ?

Sementara rumusan masalah khusus antara lain:

1. Bagaimana Penganggaran (*Budgeting*) Pembiayaan Operasional Pendidikan di As-Syifa *Boarding School* Jalancagak Subang?
2. Bagaimana Pelaksanaan (*Accounting*) Pembiayaan Operasional Pendidikan di As-Syifa *Boarding School* Jalancagak Subang?
3. Bagaimana Penilaian (*Auditing*) Pembiayaan Operasional di As-Syifa *Boarding School* Jalancagak Subang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen pembiayaan operasional di SMPIT As-Syifa *Boarding School* Jalancagak Subang. Sementara tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisa Penganggaran (*Budgeting*) Pembiayaan Operasional Pendidikan di As-Syifa *Boarding School* Jalancagak Subang.
2. Untuk Menganalisa Pelaksanaan (*Accounting*) Pembiayaan Operasional Pendidikan di As-Syifa *Boarding School* Jalancagak Subang.
3. Untuk Menganalisa Penilaian (*Auditing*) Pembiayaan Operasional Pendidikan di As-Syifa *Boarding School* Jalancagak Subang.

D. Manfaat Penelitian

Maka dari itu dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi dalam proses pengelolaan pembiayaan pendidikan di sebuah Lembaga dan membandingkan antara kajian-kajian teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga akan

memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses pengelolaan pembiayaan operasional Pendidikan khususnya yang di Lembaga Pendidikan swasta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai *point of reference* bagi pihak Lembaga pendidikan dalam mengembangkan Pendidikan mandiri secara ekonomi, dan melakukan pengelolaan pembiayaannya dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan sumber dana, mengalokasikannya serta mendistribusikannya dengan tepat.
- b) Bahan pertimbangan bagi jajaran pimpinan dinas pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui aspek ekonomi dan bisnis agar setiap Lembaga mampu berdiri sendiri dan mampu meningkatkan mutu Pendidikan karena segala aspek primernya terpenuhi.
- c) Bagi peneliti, ini merupakan temuan yang akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan sebuah Lembaga Pendidikan dengan pengelolaan pembiayaan yang baik dan tertib administrasi.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sekarang ini *Boarding School* sebagai Lembaga yang mengintegrasikan Pendidikan akademik dan non akademik yang secara umum mengadopsi konsep dari pondok pesantren. Perkembangan *Boarding School* di Indonesia dan meningkatnya peminat serta arga yang cukup tinggi dengan kualitas lulusan yang tidak diragukan menjadikan *Boarding School* sebagai objek penelitian yang menarik. Terlebih *Boarding School* sebagai Lembaga Pendidikan yang mampu berdiri sendiri secara finansial menjadi keunggulan tersendiri ; tujuan Pendidikan dituju, manfaat bagi masyarakat pun sampai. Terdapat beberapa aspek terkait pembiayaan

Pendidikan yang telah dikaji, baik itu dalam pengelolaannya, maupun pengaruhnya terhadap mutu Pendidikan.

Berdasarkan penelusuran terdapat beberapa penelitian yang berkaitan relevan dan berkaitan dengan Manajemen Pembiayaan Operasional Pendidikan sebagai salah satu referensi dan rujukan dalam penyusunan tesis ini, antara lain :

1. Pipin Destiani (2017)

Penelitian yang ditulis Pipin Destiani berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor.”¹² penelitian ini memiliki latar belakang yakni keyakinannya tentang betapa penting biaya Pendidikan sehingga peran pemerintah besar disana. Bahkan sebagai *funding full state*. Namun pada kenyataannya tidak jarang Lembaga Pendidikan yang membebankan biaya sekolah kepada orang tua karena banyaknya komponen biaya yang harus dipenuhi termasuk pada pondok pesantren daru muttaqien bogor yang dikenal sebagai Lembaga Pendidikan favorit.

Berkaitan dengan hal itu Pipin Destiani membatasi masalah penelitian untuk dikaji berkaitan dengan bagaimana Darul Muttaqien Parung Bogor dalam melaksanakan sistem pembiayaan Pendidikan di pesantrennya, yang dibagi pada tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem pembiayaan. Metode yang dilakukan pada tesis yang ditulis Idha Ilham menggunakan metode kualitatif, sementara penyajian data dan kesimpulan diuraikan secara deskriptif. Peneliti menggali sumber data dalam penelitian ini yang menjadi populasi umumnya terdiri dari seluruh dosen negeri di Yogyakarta, sedangkan yang menjadi Populasi targetnya yakni dosen-dosen khusus M IPA di Yogyakarta. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara analisis datanya dilakukan melalui tiga tahapan dalam reduksi data.

¹² Pipin Desniati, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor* (Tesis : Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019). 52

Hasil penelitian pada tesis ini diantaranya : pada proses Implementasi perencanaan sistem manajemen pembiayaan pendidikan, meliputi kebijakan sistem yang ada di Lembaga terkait dirancang oleh pimpinan pondok pesantren yang terdiri dari ketua yayasan, wakil pimpinan pondok, dan bendahara pondok. Sedangkan pada pelaksanaan sistem pembiayaan Pondok Pesantren Darul Muttaqien sudah berjalan sejak empat tahun silam khususnya pada tahun ajaran 2018-2019. Yang terakhir proses evaluasi yang ternyata ditemukan fakta bahwa masih memiliki berapa kendala mengenai kurangnya sosialisasi perubahan penggunaan sistem dari manual ke perangkat digital, pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem pembiayaan masih terbatas, serta perangkat yang menunjang sistem pembiayaan belum memadai.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang ditulis Pipin Destiani dan peneliti yakni, pada judul penelitian, tesis yang ditulis Pipin mengenai manajemen pembiayaan Pendidikan secara umum, sedangkan tesis yang ditulis peneliti berfokus pada manajemen pembiayaan operasional Lembaga. Terkait tahapan manajemen pembiayaan yang digunakan yakni sama-sama menggunakan teori Thomas H John. Namun pada tesis yang ditulis Pipin tidak disertakan penawaran gagasan yang mencakup Analisa tantangan, hambatan, dan proyeksi kedepannya.

2. Masditou (2019)

Jurnal yang ditulis Masditou selaku peneliti berjudul, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu.”¹³ Penelitian ini didasari atas kesadaran peneliti terhadap pentingnya pembiayaan Pendidikan demi tercapainya delapan standar untuk menciptakan kualitas Pendidikan. Maka pengelolaan pembiayaan di sebuah Lembaga Pendidikan memerlukan sistem dan manajemen yang baik. Disamping itu perubahan otonomi daerah mengenai kewenangan pengelolaan pembiayaan membuat setiap Lembaga memiliki

¹³Masditou, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu”. *Jurnal ANSIRU PAI*, 4:1 (Juli 2017), 135.

tanggungjawab penuh terhadap proses pengelolaan pembiayaan di Lembaga terkait yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Berdasarkan latarbelakang penelitian, tujuan peneliti yakni untuk menganalisa implementasi tahapan pengelolaan pembiayaan. Sehingga bisa membantu memberikan solusi terkait berbagai permasalahan yang timbul mengenai pengelolaan pembiayaan Pendidikan yang terjadi di Lembaga Pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran harus dilakukan dengan mengklasifikasikan kegiatan yang akan dilakukan selama periode penganggaran berdasarkan kebutuhan, lalu melakukan pengembangan rencana anggaran. Sementara proses akuntansi harus dilakukan dengan mengidentifikasi data yang berkaitan, menganalisis data tersebut, dan mengubah data menjadi informasi berupa laporan yang mudah dipahami dan sesuai ketentuan yang ada. Sedangkan Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang ditulis Masditou dengan peneliti, yakni terletak pada jenis karya tulis, Masditou menuliskan dalam bentuk jurnal sedangkan peneliti Tesis. Tahapan manajemen pembiayaan yang dikaji sama-sama meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, hanya saja Teori yang ada dalam jurnal ini menjadi salah satu teori yang digunakan penulis dalam penelitiannya. Selain itu penelitian Masditou tidak berfokus pada Lembaga tertentu, melainkan mengkaji manajemen pembiayaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan pemerintah dan dikuatkan oleh teori yang ada.

3. Idha Ilham (2021)

Idha Ilham menuliskan tesis yang berjudul , “Manajemen Pembiayaan di Madrasah Tsanawiyah Mathla’ul Anwar Kedondong Pesawaran.”¹⁴ Tesis ini ditulis pada tahun 2021. Penelitian yang ditulis didasari atas perubahan otonomi daerah dan

¹⁴ Idha Ilham, *Manajemen Pembiayaan di Madrasah Tsanawiyah Mathla’ul Anwar Kedondong Pesawaran*. (Tesis : UIN Raden Intan Lampung, 2021), 56

desentralisasi Pendidikan manajemen pembiayaan Pendidikan berbasis madrasah yang mengharuskan pengalokasian pada penyediaan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran, serta prestasi belajar peserta didik.

Berdasarkan latar belakang pada tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana manajemen pembiayaan di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar dilaksanakan, dan mengapa prosedur tersebut perlu dilakukan. Sementara subfokus dan rumusan masalah penelitian pada tesis yang ditulis idha diantaranya: Perencanaan (*Budgeting*), Pelaksanaan (*Accounting*), dan Penilaian (*Auditing*).

Metode yang dilakukan pada tesis yang ditulis Idha Ilham menggunakan metode kualitatif, sementara penyajian data dan kesimpulan diuraikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini Peneliti menggali sumber data dari Kepala Madrasah, Bendahara madrasah, dan Wakil kepala sekolah bagian Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data.

Hasil penelitian pada tesis ini secara umum sudah cukup baik karena proses perencanaan yang dilakukan mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM). Begitupula realisasi anggarannya sudah dilakukan sesuai dengan RKAM yang diajukan, dalam arti pembukuannya sesuai dengan anggaran. Sementara itu proses pengawasan pembiayaan yang dilakukan di Lembaga terkait dilakukan melalui dua tahap yakni Audit Internal yang dilakukan oleh pihak Madrasah dan audit eksternal yang dilakukan oleh dinas kabupaten setempat.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang ditulis Idha dan peneliti yakni, pada judul penelitian, tesis yang ditulis idha mengenai manajemen pembiayaan Pendidikan secara umum, sedangkan tesis yang ditulis peneliti berfokus pada manajemen pembiayaan operasional Lembaga. Terkait tahapan manajemen pembiayaan yang digunakan yakni sama-sama menggunakan teori Thomas H John meski Idha Ilham tidak mencantumkan rumusan masalahnya mengacu pada teori siapa. Selain itu, objek

penelitian Idha merupakan sekolah yang tidak mengelola pembiayaan secara sentral pada Yayasan yang menaunginya.

4. Fakarotul Karimah, 2018

Tesis yang ditulis Fakarotul Karimah berjudul, “Manajemen Pembiayaan dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di MI Tahfiz Ash-Habul Kahfi Ngawi)”¹⁵ Tesis ini didasari atas hasil observasi awal penulis di lembaga terkait bahwa standar pembiayaan merupakan hal urgen yang cukup menantang dalam penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini dikarenakan siswa tidak semua berasal dari keluarga yang mampu. Sedangkan program unggulan madrasah memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Tujuan tesis yang ditulis Fakarotul Karimah yakni untuk melihat secara nyata pelaksanaan manajemen pembiayaan Pendidikan di MI Tahfidz Ash Habul Kahfi Ngawi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi.

Hasil penelitian pada tesis yang ditulis Fakarotul Karimah diantaranya : Pertama, perencanaan yang dilakukan di Lembaga terkait menghasilkan efisiensi anggaran, pelaksanaan fungsi manajemen yang maksimal serta berhasil terakomodirnya kebutuhan siswa. Kedua, pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan di lembaga terkait bertindak sesuai perencanaan dengan prosedur yang ada dalam bantuan BOS, Lembaga terkait menyadari akan pentingnya orientasi dan menggerakkan operator agar visi tercapai, sesuai dengan prinsip actuating dan kehati-hatian. Ketiga, pengawasan pembiayaan pendidikan (controlling) yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, dan penyimpangan, namun pada fakta di lapangan masih terdapat pembiayaan yang tidak tercantum dalam APBM, sehingga Lembaga masih memerlukan tambahan biaya dari sumber

¹⁵Fakarotul Karimah, *Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di MI Tahfidz Ash-Habul Kahfi Ngawi)*, (Tesis : IAIN Ponorogo, 2018). 35

lain. Keempat, mutu pendidikan Islam menjadi sasaran utama masyarakat atau pihak pelanggan.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang ditulis Fakarotul Karimah dan peneliti yakni, pada judul penelitian, tesis yang ditulis Fakarotul Karimah mengenai manajemen pembiayaan Pendidikan secara umum yang dikaitkan dengan mutu pendidikan, sedangkan tesis yang ditulis peneliti berfokus pada manajemen pembiayaan operasional Lembaga. Terkait tahapan manajemen pembiayaan yang digunakan yakni sama-sama menggunakan teori Thomas H John meski Fakarotul Karimah tidak mencantumkan rumusan masalahnya mengacu pada teori siapa. Selain itu, objek penelitian Idha merupakan sekolah yang tidak mengelola pembiayaan secara sentral pada Yayasan yang menaunginya. Tesis Fakarotul Karimah juga tidak menuliskan penawaran gagasan mengenai proyeksi Lembaga kedepan.

F. Kerangka Berpikir

Konsep biaya di bidang Pendidikan memandang bahwa Lembaga Pendidikan merupakan produsen jasa Pendidikan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan. Lembaga Pendidikan memperoleh input berupa sumber daya manusia yang kemudian diproses melalui kegiatan Pendidikan dan keterampilan untuk menghasilkan output yang mampu bersaing serta memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Sedangkan mengenai pembiayaan Pendidikan disampaikan Nanang Fattah, menurutnya biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan. Besaran serta sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing daerah dari segi ekonomi, tingkat Pendidikan maupun program pembiayaan pemerintah.¹⁶

Komponen kebutuhan operasional Pendidikan yang dibiayai mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan

¹⁶ Nanang Fattah. *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. Jurnal Pendidikan Dasar*, 1:9. (April 2008), 13

supervisi pendidikan. Selain dari itu, biaya Pendidikan juga mencakup biaya investasi untuk sarana prasarana dan kebutuhan personal keseharian lainnya (terutama bagi Lembaga *boarding school*) yang bersifat jangka Panjang.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX Pasal 62 terdiri dari tiga bagian besar yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.¹⁷

Biaya investasi diatas maksudnya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Lembaga yang sifatnya jangka panjang, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sementara Biaya personal berarti biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik secara personal agar bisa mengikuti proses pembelajaran yang terartur dan administratif. Sedangkan biaya operasi berarti biaya yang digunakan untuk keperluan operasional Pendidikan, operasional berarti biaya yang diperlukan untuk kebutuhan Pendidikan secara teknis meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai. Sedangkan biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Sementara berkaitan dengan penanggungjawab pembiayaan Pendidikan disampaikan dalam peraturan pemerintah RI Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 2 yaitu, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat."¹⁸

Dalam mencapai tujuan akan kebutuhan pendanaan Lembaga yang baik, maka dibutuhkan kreatifitas dan keterampilan dalam menggali sumber-sumber dana serta bisa mengalokasikannya secara benar sesuai ketentuan yang ada. Strategi dalam mewujudkan Lembaga yang mampu menjalankan kegiatan pembiayaan yang transparan dan akuntabel harus memiliki elemen yang menunjang, seperti : sumber

¹⁷ Nanang Fattah. "Pembiayaan Pendidikan, 13

¹⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 pasal 2, *Tentang Pendanaan Pendidikan*.

daya manusia, sumber dana yang mengalir, serta sistem pengelolaan berbasis teknologi dan mudah dipahami. Pembentukan organisasi khusus pengelola keuangan lembaga menjadi salah satu program yang dibentuk untuk berorientasi pada kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pembelajaran demi perwujudan visi dan misi Lembaga.

Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dibahas secara komprehensif dalam disiplin ilmu manajemen pembiayaan Pendidikan. Manajemen pembiayaan Pendidikan yaitu kemampuan dalam mengumpulkan dana (*raising of fund*) dan mengalokasikan dana (*allocation of fund*) tersebut untuk menopang semua kegiatan sehingga tujuan Pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan tersebut Tomas H. Jones dikutip oleh tim dosen administrasi UPI menjelaskan bahwa “manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ketiga tahapan ini bila diterapkan dalam manajemen keuangan atau pembiayaan menjadi tahap perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*akunting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*).”¹⁹

Langkah yang akan dilakukan peneliti berkaitan dengan teori manajemen pembiayaan diatas diantaranya sebagai berikut :

1) Penganggaran (*Budgeting*)

Nanang Fattah yang dikutip Jaja Jahari mengartikan penganggaran (*budgeting*) sebagai proses dan penyusunan anggaran. Selain digunakan sebagai alat untuk menyusun, namun juga sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu Lembaga atau organisasi dalam bertindak.²⁰

Proses *budgeting* berdasarkan teori diatas dikembangkan oleh peneliti untuk dijadikan indikator penelitian dalam penganggaran (*budgeting*) di lokasi penelitian. Diantaranya : 1) Perencanaan Penganggaran, mencakup bagaimana persiapan dan persepsi Lembaga terkat penganggaran, 2) Sistem penyusunan anggara, yakni

¹⁹ Masditou, “Manajemen Pembiayaan, 137

²⁰ Eko Atmaja, Teguh. “Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMANegeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya”. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4:1, (Februari 2016), 122

bagaimana lembaga terkait melakukan penganggaran, 3) Strategi penyusunan penganggaran, berkaitan dengan alternatif yang digunakan dalam melakukan penganggaran.

2) Pelaksanaan (*Accounting*)

Definisi *accounting* atau akuntansi ialah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi ini merupakan tugas yang kompleks”.²¹ Menurut Mulyasa akunting dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dari berbagai sumber dana perlu dibukukan mengacu pada prosedur pengelolaan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.²²

Maka untuk mendapatkan informasi mengenai *accounting* di Lembaga yang akan diteliti, maka hal-hal yang menjadi indikatornya ialah bagaimana Lembaga dalam: 1) teknis penerimaan pembiayaan 2) sumber penerimaan Lembaga 3) teknis pengeluaran pembiayaan 4) pengeluaran pembiayaan Lembaga.

3) Penilaian atau Evaluasi Pembiayaan (*Auditing*)

Auditing adalah suatu proses yang sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi hasil kerja secara obyektif mengenai pernyataan kegiatan dan pendanaan untuk menetapkan tingkat validitas antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian laporannya kepada yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan pembiayaan, proses evaluasi keuangan dan pengawasan merupakan proses yang harus dilakukan, sebagaimana disampaikan Mulyasa dikutip oleh Jaja Jahari kepala sekolah perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan sekolah agar selaras dengan anggaran-anggaran belanja yang telah ditetapkan.²³

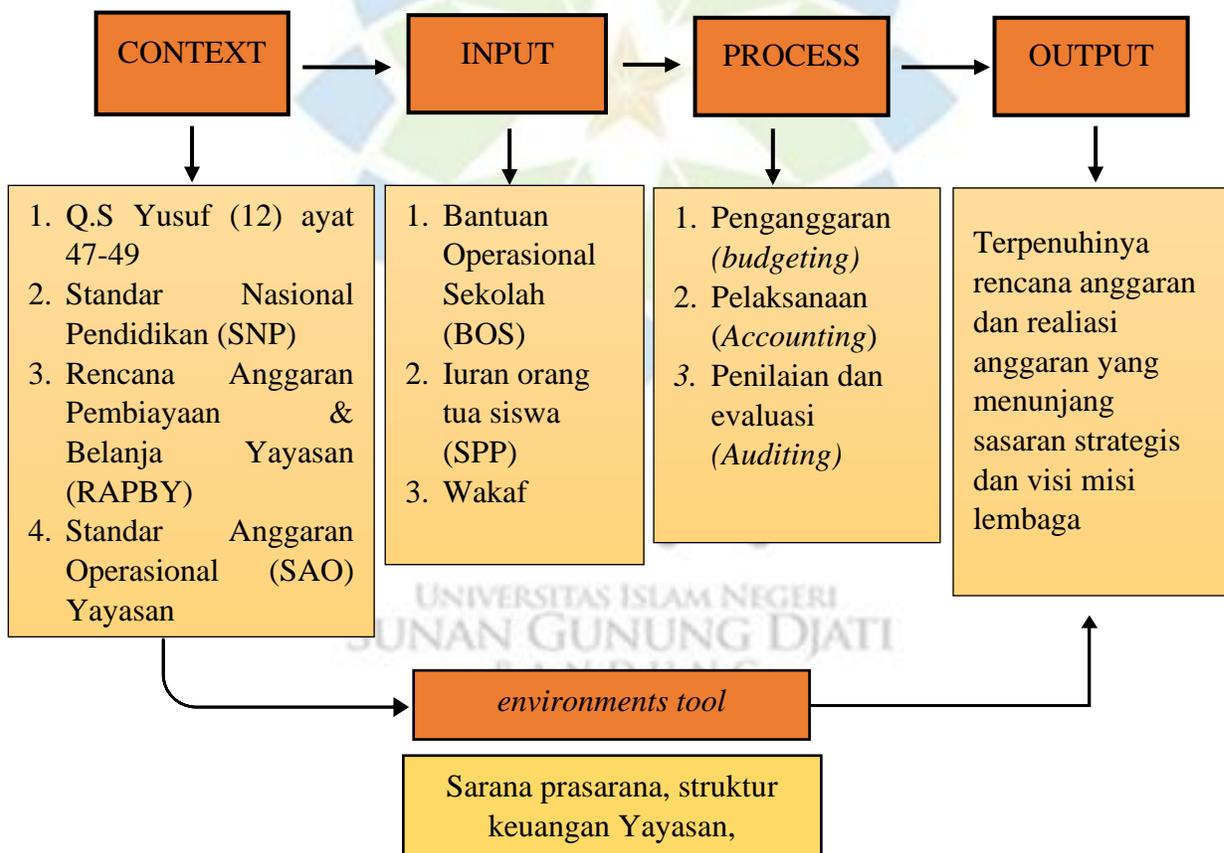
²¹ Masditou, “Manajemen Pembiayaan, 137.

²² Jaja Jahari. *Pengelolaan Pendidikan Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. (Fajar Media : Bandung, 2014), 92.

²³ Jaja Jahari, *Pengelolaan Pendidikan*, 97

Dari penjelasan diatas berikut peneliti membagi indikator penelitian dalam penilaian atau evaluasi pembiayaan, diantaranya : 1) pengawasan/pengendalian, berkaitan dengan bagaimana proses pengawasan dan pengendalian pembiayaan yang dilakukan di Lembaga terkait, 2) evaluasi, berkaitan dengan bagaimana proses evaluasi yang dilakukan di Lembaga terkait. 3) laporan dan tanggung jawab, berkaitan dengan bagaimana proses pelaporan dan tanggung jawab pembiayaan di Lembaga terkait.

Untuk memudahkan pemahaman dan alur dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Maka peneliti membuat kerangka pemikiran penelitian dengan menggunakan pendekatan CIPP Suffle beam & Guba sebagai berikut:²⁴



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian

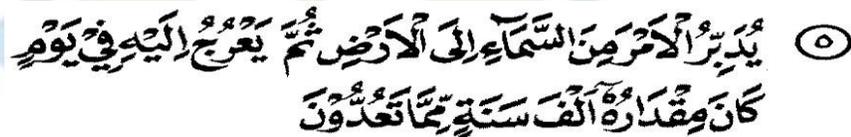
Sumber: diadaptasi dari CIPP Sufflebeam&Guba (dalam Rusidana)2017) dikembangkan oleh peneliti

G. Definisi Operasional

1. Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen juga dapat diartikan sebagai cara mengelola perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang Manajer (pengatur/pemimpin) berdasarkan urutan manajemen.

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *al-tadbir* (pengaturan).kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbaro* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah SWT:²⁵



“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu” (Q.S. As-Sajdah: 5).

Dari isi kandungan ayat diatas diketahui bahwasannya Allah SWT adalah pengatur alam (manajer). Keteraturan ala mini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. “Sondang P. Siagian mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.”²⁶

Bila kita perhatikan pengertian manajemen diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan bekerja sama dengannya, agar tujuan Bersama bisa dicapai secara efektif, efisien dan produktif.

²⁵ Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 362

²⁶ Sondang P. Siagian, *Filsafah Administrasi*, (Jakarta: CV Masaagung, 1990), 5

Nanang Fattah menjelaskan manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Manajemen merupakan suatu proses sedangkan manajer dikaitkan dengan aspek organisasi (orang-strukturtugas-organisasi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lain, serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem.²⁷

Sedangkan Manajemen Pendidikan sendiri berarti suatu proses yang dilakukan oleh seseorang agar mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan proses pendidikan, dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu *Plainning, organizing, actuating, dan controlling* agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen Pendidikan islam merupakan proses yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik itu umat islam, maupun Lembaga Pendidikan islam itu sendiri. Diantara keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama khususnya dalam mengelola Pendidikan islam. Proses pengelolaan Lembaga Pendidikan islam dengan menerapkan nilai-nilai keislaman, lebih tepat lagi dilakukan pada Lembaga Pendidikan berbasis islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi islam.

2. Manajemen Pembiayaan Operasional Pendidikan

a. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Biaya berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu, ongkos belanja, dan pengeluaran.²⁸ Secara istilah biaya merupakan kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat, baik sekarang maupun masa yang akan datang.²⁹ Dari pengertian di atas dapat

²⁷ Nanag Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 1

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/biaya> diakses pada Januari 2022 pukul 19.39 WIB.

²⁹ W, Ferdi. Financing education: “a theoretical Study”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19:4, (Juli 2022), 568

disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang (kas atau setara kas), untuk memperoleh barang atau jasa yang bermanfaat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang

Konsep biaya dalam bidang pendidikan memberikan pandangan bahwa lembaga pendidikan merupakan produsen jasa pendidikan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan. Lembaga pendidikan memperoleh *input* berupa sumber daya manusia yang kemudian diproses melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan untuk menghasilkan *output* yang mampu bersaing serta dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Pengertian lain mengenai pembiayaan Pendidikan disampaikan Nanang Fattah, menurutnya biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah.

b. Pembiayaan Operasional Pendidikan

Biaya operasional pendidikan adalah komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahkan berjalannya proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh keberadaan biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah).³⁰

³⁰ Muhammad Imad dan & Hamdan Herdiawan, "Peran Biaya Operasional Pendidikan Terhadap Output Pendidikan". *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 1:1 (Agustus 2019), 153

Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan pula dalam peraturan Daerah kota Cimahi No. 179 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidika³¹ menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan meliputi: biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Termasuk dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa biaya operasional personalia pendidikan meliputi: gaji pokok pendidik dan tenaga kependidikan dan tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, telepon, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

Peraturan Mendiknas nomor 69 tahun 2009 juga menjelaskan bahwa, standar biaya operasional non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.³²

Biaya operasional non personalia meliputi biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan,

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Jakarta: CV Ekajaya), 13

³² Abdul Hari, “Analisa Kebijakan Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan,” *Jurnal Diklat Keagamaan*, 10:69 (Juli 2016), 75.

biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industri (untuk SMK), dan biaya pelaporan. Setiap sekolah memiliki besaran yang berbeda terhadap biaya-biaya tersebut di atas, hal itu sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan yang ditentukan oleh pelaksana sekolah untuk mewujudkan output pendidikan yang berkualitas.

Biaya operasional pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah dikelola secara mandiri oleh sekolah masing-masing. Sekolah swasta memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan biaya operasional masing-masing sekolahnya. Upaya pemerintah maupun swasta yang terus meningkatkan biaya operasional pendidikan setiap tahunnya dimaksudkan untuk membantu sekolah dalam meningkatkan output pendidikan di setiap tahunnya.

